

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia, pendidikan telah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap individu. Di era globalisasi yang terus berkembang ini diiringi dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat. Masyarakat dituntut untuk serba cepat dan mampu bersaing. Salah satu cara agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan globalisasi dan teknologi ini ialah dengan upaya dan peran Pendidikan yang dapat membentuk pola pikir dan kecerdasan masyarakat serta membuka pemikiran dan sudut pandang yang terbuka.

Ketersediaan masyarakat berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sangat menentukan kemampuan suatu bangsa untuk mengakses pengetahuan global dan ekonomi pasar bebas yang membutuhkan tingkat daya saing yang tinggi. Oleh karena itu, diharapkan pendidikan mampu mengantarkan bangsa Indonesia unggul dalam persaingan global.

Proses manajemen pendidikan di dalam sekolah memiliki peranan yang amat vital agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien, karena bagaimanapun sekolah merupakan suatu sistem yang didalamnya melibatkan berbagai komponen dan sejumlah kegiatan yang perlu dikelola dengan baik dan tertib. Satu diantara hal vital tersebut adalah pengelolaan dan pemantauan mutu sekolah. Prinsip merupakan pegangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Prinsip membimbing manusia untuk tegas dalam berpikir dan bertindak. Prinsip itu sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Prinsip yang dipegang pada penjaminan mutu sekolah ialah berdasarkan sistem berkelanjutan, terencana dan sistematis, menghormati otonomi pada sekolah, memfasilitasi pembelajaran informal serta prinsip keterbukaan.

Semua prinsip tersebut menjurus pada satu tujuan yaitu terciptanya mutu sekolah yang baik.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan disebutkan dalam Pasal 2 bahwa: Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah untuk meningkatkan kecerdasan hidup manusia dan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Sejalan dengan kebijakan tersebut dikembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan yang terdiri dari dua bagian, yaitu: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

SPMI merupakan sistem mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Setiap sekolah melaksanakan SPMI secara mandiri mengikuti siklus Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. SPMI berperan sebagai *early warning system*, artinya jika dilaksanakan secara cermat dan tepat, SPMI dapat dijadikan sebagai perbaikan sepanjang proses pelatihan agar tidak semakin parah. Sedangkan SPME merupakan sistem mutu eksternal yang dipengaruhi dari luar, misalnya oleh pemerintah dan pengambil keputusan di luar sekolah.²

Meliputi semua aspek penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan SPMI mengintegrasikan dan memanfaatkan sejumlah sumber daya yang ada untuk mencapai 8 standar nasional pendidikan. Delapan Standar Nasional Pendidikan itu diantaranya, standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar

¹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2009. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*

² Darmaji, Achmad Supriyanto dan Agus Timan, Jurnal “Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan”, (JMSP: Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan, Vol. 3 NO. 3 Juli 2019), h.132

penilaian Pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan terakhir standar pembiayaan. Untuk mencapai seluruh standar nasional Pendidikan tersebut, sekolah perlu melakukan proses sistem penjaminan mutu internal agar tercapainya mutu Pendidikan yang sesuai standar bahkan lebih baik dari standar nasional yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan SPMI terdiri dari lima langkah operasional, yaitu:

1) Survei mutu pendidikan satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan; 2) Pembuatan rencana peningkatan mutu sesuai dengan rencana kerja sekolah (RKS); 3) Terlaksananya persyaratan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun dalam pembelajaran; 4) Pemantauan dan evaluasi proses pengendalian mutu yang dilaksanakan; dan 5) Menetapkan standar baru dan merumuskan strategi peningkatan mutu berdasarkan pemantauan dan evaluasi hasil. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berperan sebagai langkah preventif pihak pelaksana pendidikan yang berada dalam lingkup sekolah. Pihak pelaksana / penyelenggara Pendidikan terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah yang dimana harus memenuhi setidaknya 8 standar pendidikan yang sudah ditetapkan. Dengan adanya SPMI ini, pihak internal sekolah mendirikan/membentuk tim internal untuk melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap segala aspek yang memenuhi dan mempengaruhi terhadap mutu pendidikan yang ada di sekolah. Dimulai dari kualitas pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembelajaran dan yang lainnya.

Yang menjadi permasalahan dalam standar mutu Pendidikan di Indonesia ialah sering ditemukannya satuan Pendidikan yang memiliki peserta didik terlalu banyak dan melampaui ketentuan batas maksimum kuota penerimaan siswa. Akibatnya, pendidik dapat kesulitan dalam menjalani pengelolaan kelas dan siswa tidak dapat belajar secara efisien dan optimal. Ditemukan banyaknya pelanggaran dalam penetapan jumlah peserta didik dalam satu kelas

disebabkan oleh tidak adanya sanksi yang tegas bagi satuan Pendidikan yang melanggar hal tersebut. Dalam penelitian *The Impact of Number of Students per Teacher on Student Achievement, Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol 177, pp.65-70*. Dalam penelitian ini yang dilakukan pada negara maju hal tersebut tidak terjadi, karena negara maju telah menyadari untuk menerapkan aturan tegas dan melakukan penutupan penerimaan siswa jika sudah melebihi kuota yang ditetapkan. Karena, negara maju tersebut menyadari dampak rasio pendidik dan peserta didik yang tidak seimbang akan mempengaruhi kualitas Pendidikan.

Dilihat dari data *World Population Review* pada tahun 2022, rata – rata IQ penduduk di Indonesia yaitu 78,49. Hal itu membuat Indonesia berada pada peringkat 130 dari 199 negara yang diuji.³ Skor tersebut sangat tergantung pada kualitas pendidikan Indonesia. Dalam beberapa penelitian biasanya menggunakan sistem pemeringkatan pendidikan atau biasa disebut dengan (skor PISA). Skor PISA ini digunakan untuk dasar perbandingan kecerdasan penduduk. Hal ini tak bisa dipungkiri dan diubah bahwa nilai rata-rata, skor PISA Indonesia sendiri sangat amat memprihatinkan. Bahkan tidak mencapai skor rata – rata negara OECD (Yanti, 2022). Dari data tersebut menunjukkan bahwa kualitas Pendidikan Indonesia masih belum baik untuk mencapai skor rata – rata yang lebih tinggi. Oleh karena itu, proses peningkatan mutu sudah seharusnya diupayakan agar kualitas Pendidikan di Indonesia bisa jauh lebih meningkat. Salah satu upaya meningkatkan kualitas mutu Pendidikan ialah dengan terus melakukan Sistem Penjaminan Mutu secara rutin dan pada tahapan akhir penjaminan mutu menemukan standar peningkatan mutu Pendidikan yang terbaru.

Selain itu, adanya permasalahan terkait kualitas dan mutu Pendidikan di Indonesia salah satunya ialah permasalahan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan yang belum cukup memadai.

³ *World Population Review 2022. Rata – rata IQ penduduk Indonesia.*

Ditinjau dari Standar Nasional Pendidikan, salah satunya ialah mencakup standar sarana dan prasarana yang layak dan dapat menunjang semua proses belajar dan mengajar di sekolah yang mampu menunjang mutu Pendidikan dan mutu lulusan. Namun, dari segi sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata layak terutama sekolah di desa desa yang jauh dari perkotaan. Masih banyak gedung sekolah yang tidak layak atau rusak bahkan sampai rawan roboh, hal tersebut tentu sangat mengganggu kenyamanan siswa maupun guru dalam proses pembelajaran. Selain itu, fasilitas sekolah yang kurang lengkap seperti tidak adanya perpustakaan tentu akan mengurangi referensi atau sumber belajar siswa. Media belajar yang masih minim dan penggunaan teknologi informasi yang kurang memadai juga menjadi permasalahan sekolah yang jauh dari pusat kota. Hal – hal tersebut tentu akan sangat mempengaruhi kualitas pendidikan Indonesia.

Permasalahan lainnya ialah terkait dengan standar tenaga pendidik yang berperan dalam pembentukan dan mendidik para peserta didik. Kurangnya kesejahteraan akan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menjadi salah satu lemahnya proses Pendidikan dan mutu Pendidikan di Indonesia. Dilihat dari upah yang sangat kecil, proses pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang masih kurang dan belum merata, dan beberapa fasilitas peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang belum baik. Tidak sedikit guru yang kurang profesional dalam proses belajar mengajar, kenyataannya banyak guru yang masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya. Sebagai contoh, guru terlambat hadir di kelas, terlalu banyak bercerita sehingga waktu pembelajaran tidak menjelaskan materi secara maksimal, kurang memahami karakteristik siswanya, kurang memahami konsep materi yang diajarkan bahkan ada guru yang masuk kelas hanya memberikan tugas lalu pergi. Namun, di balik kualitas guru yang buruk ini ada faktor kesejahteraan guru yang rendah. Guru di

Indonesia terlalu banyak diberi beban dan gaji yang tidak seberapa terutama guru honorer. Guru di Indonesia selain diberi kewajiban untuk mengajar juga diberi tugas administratif yang cukup rumit serta tanggung jawab lebih di sekolah. Hal tersebut mungkin mengganggu tugas utama guru yaitu mengajar, sehingga pada proses belajar mengajar terganggu dan menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan. Hal – hal tersebut menjadikan mutu Pendidikan di Indonesia tidak berjalan secara maksimal.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) memberikan skor 1,6 untuk Rapor Pendidikan Indonesia pada 2022.⁴ Skor tersebut merupakan skor yang cukup rendah karena pemberian skor JPPI ialah berskala 1-5. Hasil skor tersebut diperoleh dengan melakukan *focus grup discussion* di beberapa daerah Jabodetabek hingga Jawa Tengah. Skor rapor Pendidikan tersebut dirincikan dengan lima dimensi penilaian yang ditentukan oleh JPPI yaitu, *governance, availability, accessibility, acceptability, dan adaptability*. Adapun, setiap dimensi ditentukan sejumlah indikator penilaian. pada dimensi *governance*, indikator transparansi mendapat nilai 1 dan indikator partisipasi diberikan nilai 1.

Nilai tersebut diberikan karena masih cukup banyak ditemukan permasalahan terkait kasus korupsi dan banyaknya komite sekolah yang tidak berfungsi. Kemudian, pada dimensi *availability* mendapatkan skor sebesar 3 karena indikator penilaian ialah ketersediaan sekolah yang masih kurang dan asil uji kompetensi guru yang masih buruk. Lalu, pada dimensi *accessibility* terdapat indikator biaya sekolah dengan skor 2 dan angka partisipasi kasar mendapat skor 3. Kemudian, pada dimensi *acceptability*, terdapat indikator *output* pembelajaran dan lingkungan dengan skor masing-masing 1. Terakhir, dimensi *adaptability* dengan indikator difabel mendapat skor 2 dan indikator pekerja anak dengan skor 1.

⁴ Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) 2022. Dilansir pada 4 januari 2023. <https://new-indonesia.org/jppi-rapor-pendidikan-indonesia-2022-mendapat-skor-16/>

Skor diberikan karena masih minimnya akses sekolah ramah difabel dan meningkatnya anak putus sekolah dan menjadi pekerja.

Oleh sebab permasalahan – permasalahan yang terjadi terkait standar mutu dan sistem mutu di Indonesia yang berjalan kurang baik, upaya maksimal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan para pemangku kebijakan Pendidikan di sekolah terkait permasalahan Pendidikan ialah dengan melakukan peninjauan, pemantauan dan perbaikan melalui adanya sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh pihak dalam sekolah dan sistem penjaminan mutu eksternal yang melibatkan pihak luar sekolah. Dengan adanya sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan sekolah yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai SNP. Satuan pendidikan menerapkan keseluruhan siklus dalam sistem penjaminan mutu secara mandiri dan berkesinambungan hingga budaya mutu di satuan pendidikan dapat terbentuk. Sistem penjaminan mutu ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan untuk ditetapkan oleh satuan pendidikan dan dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Pada penelitian ini memfokuskan pada permasalahan sistem penjaminan mutu internal yang dimana masih ditemukan masalah utama rendahnya mutu Pendidikan menengah di Indonesia khususnya di provinsi Banten adalah belum optimalnya pengelolaan program – program Pendidikan berupa program akademik, SDM (kepala sekolah, guru, dan staf TU), keuangan, kelembagaan, dan akuntabilitas sekolah. Implementasi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan hingga saat ini masih menghadapi berbagai macam permasalahan antara lain:⁵ (1) sekolah belum memiliki persepsi yang

⁵ Ridwan Abdullah Sani, dkk. *Sistem Penjaminan Mutu Internal*, (Tangerang: Tira Smart: 2018), hal. 20-21

sama terhadap berbagai aspek dan indikator penilaian SNP sebagai acuan mutu pendidikan; (2) pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan masih terbatas pada pemantauan komponen mutu di satuan pendidikan; (3) pemetaan mutu masih dalam bentuk pendataan pencapaian mutu pendidikan yang belum terpadu dari berbagai penyelenggara pendidikan; dan (4) tindak lanjut hasil pendataan mutu pendidikan yang belum dimanfaatkan untuk keperluan peningkatan mutu berkelanjutan, (5) pelaksanaan penilaian Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan instrumen penilaiannya belum dipahami secara utuh sebagai kebutuhan sekolah. Seluruh komponen standar mutu tersebut perlu dikaji dengan sistem penjaminan mutu yang dilakukan pihak internal dengan baik, sehingga dapat mewujudkan mutu Pendidikan yang berkualitas baik.

Salah satu sekolah yang sudah melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan mengimplementasikan SPMI adalah SMP Negeri 3 Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pendahuluan pada tanggal 16 januari – 20 januari peneliti bahwa SMP Negeri 3 Tangerang Selatan sudah di amanatkan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan untuk menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Dalam hal Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Menengah Pertama di provinsi Banten, khususnya daerah Tangerang selatan. SMP Negeri 3 Tangerang Selatan merupakan salah satu sekolah unggulan/favorit di kota Tangerang selatan yang sudah melaksanakan dan mewujudkan proses Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan baik dan terus berupaya meningkatkan mutu sekolah. Sehingga, dari penerapan SPMI yang berjalan baik tersebut menjadikan SMPN 3 Tangerang selatan masuk pada urutan sekolah unggulan, dan dapat meraih prestasi – prestasi sekolah maupun peserta didik yang membanggakan. Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Banten Nomor: 038/BAN-SM-Prov/SK/2018, menyatakan bahwa

SMPN 3 Tangerang Selatan telah terakreditasi A (Unggul) dengan nilai rata – rata 96.⁶

Penjaminan mutu pendidikan melalui kegiatan SPMI di SMP Negeri 3 Tangerang Selatan secara resmi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dari LPMP sejak tahun pelajaran 2017. Dalam menjalankan kegiatan SPMI ada tim tersendiri yang bernama Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS). TPMPS ini bertugas untuk 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan, 2) Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan, 3) Melaksanakan Pemetaan Mutu Pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan. 4) Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan, dan 5) Memberikan rekomendasi strategi pemenuhan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala satuan Pendidikan.

Oleh karena itu, peneliti memilih SMPN 3 Tangerang Selatan sebagai objek dalam penelitian karena menilai bahwa SMPN 3 Tangerang Selatan merupakan sekolah menengah yang unggul dan telah melaksanakan proses Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan Baik dan memperoleh hasil standar – standar yang telah ditetapkan dengan sangat baik. Dari hal tersebut, menjadikan SMPN 3 Tangerang Selatan sebagai objek penelitian yang tepat dalam penelitian ini mengenai sistem penjaminan mutu internal. Penelitian ini nantinya akan mengkaji lebih dalam mengenai sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh SMPN 3 Tangerang Selatan.

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sistem Penjaminan Mutu Internal SMPN 3 Tangerang Selatan”**

⁶ Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Banten Nomor: 038/BAN-SM-Prov/SK/2018.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditemukan fokus penelitian ini dibatasi pada aspek “Sistem Penjaminan Mutu Internal SMPN 3 Tangerang Selatan”. Adapun sub-fokus penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan Mutu Pendidikan di SMPN 3 Tangerang Selatan
2. Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu di SMPN 3 Tangerang Selatan
3. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu di SMPN 3 Tangerang Selatan
4. Monitoring dan Evaluasi Proses Pelaksanaan Pemenuhan Mutu Yang Telah Dilakukan di SMPN 3 Tangerang Selatan

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian tersebut, maka peneliti dapat dirincikan secara garis besar agar permasalahan yang ada di lapangan tidak meluas, terdapat beberapa pertanyaan yang akan dikaji, ialah memuat:

1. Bagaimanakah Pemetaan Mutu Pendidikan Di SMPN 3 Tangerang Selatan?
2. Bagaimana Proses Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu di SMPN 3 Tangerang Selatan?
3. Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Mutu di SMPN 3 Tangerang Selatan?
4. Bagaimanakah Proses Monitoring dan Evaluasi Proses Pelaksanaan Pemenuhan Mutu Yang Telah Dilakukan di SMPN 3 Tangerang Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pertanyaan penelitian, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara mendalam mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMI) SMPN 3 Tangerang Selatan. Dengan tujuan khusus untuk mengetahui Langkah – Langkah SPMI SMPN 3 Tangerang Selatan dengan Sub Fokus di bawah ini:

1. Pemetaan Mutu Pendidikan di SMPN 3 Tangerang Selatan
2. Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu di SMPN 3 Tangerang Selatan
3. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu di SMPN 3 Tangerang Selatan
4. Monitoring dan Evaluasi Proses Pelaksanaan Pemenuhan Mutu Yang Telah Dilakukan di SMPN 3 Tangerang Selatan

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang khususnya pada bidang manajemen pendidikan, mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini menjadi sarana pengimplementasian ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan yang hasilnya dapat bermanfaat.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bermanfaat bagi proses pengevaluasian, penilaian dan

peningkatan mutu sekolah yang sudah dilaksanakan agar lebih baik kedepannya.

c. Bagi Civitas Akademika

Manfaat penelitian bagi mahasiswa adalah para mahasiswa dapat menerapkan teori-teori yang diterima dalam kondisi nyata pada hasil penelitian ini sangat membantu untuk memperdalam pemahaman Anda tentang bidang studi sesuai dengan topik penelitian, Khususnya penerapan teori pada fokus sistem penjaminan mutu internal. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membaca dan juga penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti lain di masa yang akan datang.

